

***THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN COCONUT-BASED ECONOMIC
EMPOWERMENT IN INDRAGIRI HILIR REGENCY***

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
BERBASIS KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Rahman Syahputra¹, Muhammad Fadli Luran², Melani Syahira³

Universitas Ibnu Sina^{1,2,3}

rahman@uis.ac.id¹, fadli@uis.ac.id², msyahira386@gmail.com³

ABSTRACT

Indragiri Hilir Regency is the largest coconut production center in Indonesia, covering 303,927 hectares of plantation area with an annual production exceeding 450 million coconuts. Despite this enormous potential, most farmers still sell raw coconuts at Rp 1,200–2,200 per nut, while processed products can yield value additions of 300–600%. This study aims to analyze the role of local government and to identify constraints and solutions in coconut-based economic empowerment. A descriptive qualitative method with a phenomenological approach was employed through in-depth interviews, observation, and documentation. Findings indicate that the local government's roles as regulator, facilitator, dynamisator, and catalyst have not been implemented in an integrated or optimal manner. Training programs remain sporadic, downstream processing is underdeveloped, and farmers' market access is severely constrained by middlemen and monopsonistic market structures. Overall, coconut-based economic empowerment in Indragiri Hilir remains at the capacity building stage and has not yet reached the stage of genuine empowerment. Successful empowerment requires integrated upstream-downstream policies, human resource development, market access, and sustainable economic institutional support.

Keywords: *Local Government Role, Economic Empowerment, Coconut Management, Indragiri Hilir, Downstream Processing*

ABSTRAK

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan mencapai 303.927 hektar dan produksi lebih dari 450 juta butir per tahun. Meskipun potensinya sangat besar, sebagian besar petani masih menjual kelapa dalam bentuk mentah dengan harga Rp 1.200–2.200 per butir, sementara nilai tambah produk olahannya bisa mencapai 300–600% lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dan mengungkap kendala serta solusi dalam pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator belum berjalan secara optimal dan terintegrasi. Pelatihan yang diberikan masih bersifat sporadis, hilirisasi belum berkembang, dan akses pasar petani sangat terbatas akibat dominasi tengkulak dan struktur pasar monopsonistis. Secara keseluruhan, pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada tahap penguatan kapasitas (*capacity building*) dan belum mencapai tahap kemandirian (*empowerment*). Keberhasilan pemberdayaan membutuhkan integrasi kebijakan hulu-hilir, penguatan SDM, akses pasar, dan kelembagaan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Ekonomi, Pengelolaan Kelapa Indragiri Hilir, Hilirisasi

PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir, yang dikenal dengan julukan "Negeri Hampanan Kelapa Dunia", merupakan sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir (2023), luas perkebunan kelapa di daerah ini mencapai 303.927

hektar, di mana sekitar 80% di antaranya merupakan kebun rakyat. Provinsi Riau, dengan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai kontributornya, mencatatkan produksi kelapa sebesar 395 ribu ton pada tahun 2021 tertinggi secara nasional dari total produksi kelapa Indonesia sebesar 2,85 juta ton (BPS, 2022). Secara keseluruhan,

komoditas kelapa menjadi tumpuan ekonomi bagi sekitar 70% masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Namun demikian, potensi besar tersebut belum diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang memadai bagi petani. Persoalan mendasar yang dihadapi adalah rendahnya nilai tambah produk kelapa. Sebagian besar hasil panen masih dijual dalam bentuk mentah, yakni kelapa bulat atau kopra, tanpa melalui proses pengolahan lanjutan. Data empiris menunjukkan bahwa harga kelapa di tingkat petani pada tahun 2023 hanya berkisar Rp 1.200–2.200 per butir (BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2023), sementara produk olahannya seperti *desiccated coconut* diekspor dengan nilai setara Rp 7.000–9.000 per butir. Artinya, nilai tambah produk turunan kelapa lebih banyak dinikmati oleh industri pengolahan dan pelaku perdagangan dibandingkan petani sebagai produsen bahan baku utama, karena petani umumnya masih menjual kelapa dalam bentuk primer dengan nilai tambah yang rendah (Awami & Layaliya Faza, 2025; N. Kairupan et al., 2023).

Fenomena fluktuasi harga kelapa menjadi isu yang berulang dan melemahkan daya tahan ekonomi petani. Pada awal tahun 2026, harga kelapa di Indragiri Hilir anjlok ke kisaran Rp 2.700–2.900 per kilogram dari sebelumnya Rp 4.500–4.700 per kilogram pada awal Januari 2026, sehingga ratusan ribu petani terancam jatuh ke dalam kemiskinan (Rusdi et al., 2021a, 2021b). Tingkat inflasi daerah pada awal tahun 2026 bahkan mencapai di atas 6%, salah satunya dipicu oleh penurunan daya beli akibat anjloknya harga komoditas kelapa. Kondisi ini mempertegas urgensi intervensi pemerintah daerah dalam membangun sistem ekonomi kelapa yang lebih tangguh.

Tingkat inflasi daerah pada awal tahun 2026 bahkan mencapai di atas 6%, salah satunya dipicu oleh penurunan daya beli akibat anjloknya harga komoditas kelapa. Kondisi ini mempertegas urgensi intervensi pemerintah daerah dalam membangun sistem ekonomi kelapa yang lebih tangguh.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), minimnya akses teknologi pengolahan, serta lemahnya jaringan distribusi dan pemasaran semakin memperparah kondisi tersebut. Struktur pasar yang bersifat monopsonistis di mana harga ditentukan secara sepihak oleh pembeli dominan menyebabkan petani tidak memiliki daya tawar yang memadai (Aris et al., 2016). Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Pemerintah dituntut tidak sekadar hadir sebagai regulator formal, tetapi juga sebagai fasilitator, dinamisator, dan katalisator yang aktif mendorong transformasi ekonomi berbasis kelapa dari sektor hulu menuju hilirisasi yang bernilai tambah tinggi.

Meskipun penelitian tentang komoditas kelapa dan pengembangannya telah cukup banyak, kajian yang secara khusus menganalisis peran pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa terutama dengan pendekatan kualitatif yang menggali pengalaman empiris di lapangan masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek teknis produksi, strategi ekonomi makro, atau dampak kebijakan, namun belum mengintegrasikan dimensi pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dalam kerangka rantai nilai kelapa dari hulu hingga hilir (Syarifuddin, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut sekaligus

memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan peran pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Lokal

Dalam kerangka otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah tidak lagi sekadar menjadi pelaksana kebijakan pusat. Pemerintah daerah dituntut menjadi aktor utama dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan wilayah. Ndraha (2004) mengklasifikasikan peran pemerintah ke dalam empat fungsi utama: regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator.

Sebagai regulator, pemerintah daerah merumuskan kebijakan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekonomi, termasuk penetapan tata niaga, standarisasi produk, dan kebijakan insentif investasi. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana-prasarana, layanan pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan usaha. Peran ini mencerminkan pergeseran paradigma dari "government" menuju "governance", di mana pemerintah lebih berperan sebagai pihak yang memberdayakan aktor lainnya. Sebagai dinamisator, pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pembinaan kelompok usaha, dan penguatan kelembagaan lokal. Sebagai katalisator, pemerintah mempercepat pembangunan melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, termasuk dalam mendorong investasi, inovasi, dan kemitraan strategis (Ndraha, 2004; Rasyid, 2000).

Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola potensi yang dimiliki guna memperbaiki kualitas hidupnya. Suharto (2017) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses sekaligus tujuan: sebagai proses, ia merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah; sebagai tujuan, ia mengarah pada terciptanya kemandirian, pengetahuan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan secara ekonomi dan sosial.

Proses pemberdayaan berlangsung melalui tiga tahapan bertingkat. Pertama, tahap kesadaran (*awareness*), yakni upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi melalui sosialisasi dan edukasi. Kedua, tahap penguatan kapasitas (*capacity building*), yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan akses sumber daya melalui pelatihan dan pendampingan. Ketiga, tahap kemandirian (*independence*), di mana masyarakat telah mampu mengambil keputusan dan mengelola sumber daya secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak luar. Ketiga tahap ini merupakan prasyarat bagi keberhasilan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Suharto, 2017).

Rantai Nilai Kelapa dan Ekonomi Berbasis Komoditas

Dalam perspektif rantai nilai (*value chain*), pengembangan ekonomi berbasis komoditas kelapa mencakup keterkaitan aktivitas sektor hulu (*upstream*) seperti budidaya, penyediaan bibit, dan panen dengan sektor hilir (*downstream*) yang meliputi pengolahan produk, distribusi, hingga pemasaran guna menciptakan nilai tambah ekonomi

yang berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah penghasil kelapa (Elfahmi et al., 2024). Penguatan rantai nilai ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan. Aris (2016) menemukan bahwa investasi di sektor industri kelapa skala rumah tangga mampu meningkatkan pendapatan rata-rata rumah tangga petani sebesar 4,81%, lebih tinggi dibandingkan investasi di sektor industri skala besar (3,77%). Hal ini menegaskan pentingnya hilirisasi berbasis komunitas dalam struktur ekonomi Indragiri Hilir.

Produk turunan kelapa memiliki rentang nilai ekonomi yang sangat luas, mulai dari kopra, *Virgin Coconut Oil* (VCO), santan kemasan, tepung kelapa, arang tempurung, *cocopeat*, hingga oleokimia untuk industri kosmetik dan bioenergi. Hilirisasi komoditas kelapa yang terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi strategi nasional dalam meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing industri kelapa Indonesia di pasar global (Kementerian Pertanian RI, 2022).

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya relevan dengan topik kajian ini. Syarifuddin (2022) mengkaji strategi pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kelapa di Indragiri Hilir dan menemukan bahwa sekitar 70% masyarakat bergantung pada komoditas kelapa, namun fluktuasi harga dan lemahnya hilirisasi menjadi hambatan utama. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemberdayaan petani kelapa oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek sosialisasi program, pelatihan keterampilan pengolahan, pendampingan usaha, serta pengembangan produk bernilai tambah yang berkelanjutan (Basuki et al., 2023). Studi terbaru menunjukkan bahwa

rendahnya pengembangan hilirisasi komoditas kelapa menyebabkan petani masih berada pada posisi *price taker*, karena sebagian besar produk dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah sehingga pendapatan petani tidak berkembang secara signifikan (Iswantara et al., 2024). Aris (2016) membuktikan bahwa sektor kelapa memiliki dampak besar terhadap pembentukan *output* dan penyerapan tenaga kerja di Indragiri Hilir, namun terjadi kebocoran wilayah akibat dominasi industri pengolahan skala besar. Suprianto dan Chandra (2023) menemukan bahwa kurangnya koordinasi antara Dinas Perkebunan dengan petani menjadi faktor utama belum maksimalnya strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian ini: belum ada kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis peran pemerintah daerah melalui keempat fungsinya (*regulator, fasilitator, dinamisator, katalisator*) dalam kerangka pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa dari hulu hingga hilir, dengan menggunakan pendekatan fenomenologis yang menggali pengalaman empiris di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma fenomenologis. Pilihan ini didasarkan pada tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelapa, khususnya terkait peran pemerintah daerah. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami

subjek penelitian secara holistik dalam konteks alamiahnya. Pendekatan fenomenologis yang berakar dari pemikiran Husserl digunakan untuk menggali makna pengalaman subjektif informan terkait program pemberdayaan yang dirasakan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang dipilih karena statusnya sebagai sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia. Lokasi penelitian mencakup beberapa kecamatan yang menjadi pusat perkebunan dan pengolahan kelapa, antara lain Tempuling, Concong, Kateman, Tembilahan, Mandah, dan Gaung.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2022), dengan kriteria keterlibatan langsung dalam proses pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa. Informan terdiri atas; 1. aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir; 2. pelaku UMKM berbasis kelapa; 3. petani kelapa dari berbagai kecamatan; dan 4. tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sosial dan pemahaman mendalam tentang dinamika lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yakni wawancara

mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Ekonomi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir

Struktur perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir masih bertumpu pada sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi sebesar 48,72% terhadap PDRB pada tahun 2023. Sektor industri pengolahan hanya berkontribusi 8,64%, mengindikasikan bahwa transformasi dari ekonomi berbasis bahan mentah menuju ekonomi berbasis nilai tambah belum berlangsung secara signifikan (BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2023). Pertumbuhan ekonomi daerah hanya mencapai 3,17% pada tahun 2023, angka yang relatif rendah mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Tabel 1. Struktur PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

No	Sektor Usaha	PDRB (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	48,72
2	Pertambangan dan Penggalan	3,15
3	Industri Pengolahan	8,64
4	Konstruksi	6,35
5	Perdagangan Besar dan Eceran	10,21
6	Transportasi dan Pergudangan	4,17
7	Administrasi Pemerintahan	4,92
8	Sektor Lainnya	13,84
Total		100

Sumber: Diolah dari publikasi PDRB BPS Kabupaten Indragiri Hilir (2023)

Perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir mencakup areal seluas 303.927 hektar, dengan 80% di

antaranya merupakan kebun rakyat. Namun, produktivitas perkebunan kelapa menghadapi tantangan serius

akibat dominasi tanaman tua yang telah melewati usia produktif serta kerusakan lahan perkebunan yang dipengaruhi abrasi dan degradasi lingkungan pesisir sehingga berdampak pada penurunan hasil produksi petani (Vaulina et al., 2024). Di sisi pemasaran, dominasi PT. Pulau Sambu (bagian dari Salim Group) yang telah beroperasi sejak 1970-an menjadikan struktur pasar bersifat monopsonistis, di mana petani tidak memiliki alternatif pembeli dan terpaksa menerima harga yang ditetapkan secara sepihak.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kelapa

1. Peran sebagai Regulator

Pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan terkait sektor perkebunan dan pengolahan kelapa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program-program ini mencakup peningkatan produksi, penyuluhan pertanian, dan pengembangan industri kecil berbasis kelapa. Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum terintegrasi secara sistemik dalam mendorong transformasi dari ekonomi hulu menuju hilirisasi.

Di Kecamatan Gaung (Desa Lahang Hulu), ditemukan bahwa petani masih menjual kelapa dalam bentuk mentah karena belum ada kebijakan konkret yang mendorong pengolahan hasil panen di tingkat lokal. Ketiadaan regulasi tata niaga yang melindungi harga minimum petani menyebabkan posisi tawar masyarakat sangat lemah di hadapan pengepul. Kondisi ini sejalan dengan temuan Suprianto dan Chandra (2023) yang menyimpulkan bahwa kurangnya koordinasi antara Dinas Perkebunan dan petani menjadi

faktor penghambat utama implementasi kebijakan.

Dalam perspektif teori pemberdayaan, peran regulator seharusnya mampu menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung transformasi dari *raw material economy* menuju *value-added economy*. Ketidakterpaduan kebijakan hulu-hilir menyebabkan petani tetap terperangkap dalam posisi lemah dalam rantai nilai (Ndraha, 2004).

2. Peran sebagai Fasilitator

Pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan telah melaksanakan berbagai program fasilitasi, antara lain pelatihan pengolahan kelapa menjadi kopra dan produk turunan lainnya, serta distribusi bantuan alat produksi kepada kelompok masyarakat dan UMKM. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan beberapa kelemahan mendasar.

Di Kecamatan Tempuling, bantuan alat pengolahan kelapa diberikan kepada kelompok usaha masyarakat, tetapi tidak diikuti dengan pendampingan teknis lanjutan. Akibatnya, alat tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal karena masyarakat belum memahami cara pengoperasian yang benar. Di Kecamatan Mandah, pelatihan pengolahan kelapa hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran, tanpa tindak lanjut berupa pendampingan intensif. Masyarakat memperoleh pengetahuan dasar tetapi tidak memiliki akses terhadap modal, pasar, dan teknologi lanjutan, sehingga tidak mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Temuan ini selaras dengan penelitian Akhmad et al. (2024) yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan petani kelapa melalui penyuluhan dan pelatihan belum berjalan optimal karena masih

rendahnya inovasi pengolahan produk kelapa serta keterbatasan kapasitas dan kompetensi petani.

Peran fasilitator seharusnya tidak berhenti pada pemberian bantuan fisik, tetapi mencakup transfer pengetahuan, teknologi, dan akses pasar yang berkelanjutan. Tanpa keberlanjutan program, fasilitasi hanya bersifat simbolik dan tidak menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan.

3. Peran sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, pemerintah daerah berupaya mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan kelompok tani. Namun, intensitas dan kontinuitas pendampingan masih sangat terbatas, sehingga belum mampu mengubah pola pikir masyarakat secara signifikan.

Di Kecamatan Concong, petani masih menghadapi sistem pasar yang tidak menguntungkan, di mana harga ditentukan sepenuhnya oleh tengkulak dalam struktur monopsoni. Kondisi ini menyebabkan petani sulit keluar dari ketergantungan pada sistem ekonomi yang telah berjalan lama. Di Kecamatan Kempas, peningkatan pendapatan petani justru dilakukan secara mandiri melalui diversifikasi usaha (kelapa dan nanas), bukan melalui intervensi kolaboratif pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas dinamisasi pemerintah masih belum efektif dalam membangun kesadaran kritis dan mendorong inovasi masyarakat.

4. Peran sebagai Katalisator

Peran katalisator pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama lintas sektor (pemerintah, swasta, lembaga keuangan, dan pasar) masih sangat terbatas. Di Kecamatan Kateman, terdapat kemitraan antara

kelompok petani kelapa dengan pelaku usaha pengolahan kopra yang difasilitasi pemerintah daerah. Kemitraan ini mampu meningkatkan stabilitas harga dan kepastian pasar bagi petani, meskipun skalanya masih sangat terbatas dan belum berdampak secara luas.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan bahwa pemerintah daerah aktif menjalin kemitraan dengan investor untuk mempercepat pengembangan hilirisasi kelapa, sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan hilirisasi kelapa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang didukung oleh Kementerian PPN/Bappenas (Alkadafi et al., 2025; PPID Kabupaten Indragiri Hilir, 2024; Syah, 2023). Namun hingga saat penelitian dilakukan, kolaborasi yang nyata dengan pihak swasta dalam skala signifikan belum terwujud secara sistemik.

Bentuk Program Pemberdayaan dan Implementasinya

Berdasarkan temuan lapangan, program pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa mencakup empat komponen utama: (1) pelatihan pengolahan kelapa yang mencakup pembuatan kopra, minyak kelapa, keripik kelapa, dan produk turunan lainnya; (2) bantuan modal dan alat produksi kepada kelompok masyarakat dan UMKM; (3) pengembangan UMKM berbasis kelapa melalui pembentukan kelompok usaha dan pelatihan kewirausahaan; serta 4. upaya hilirisasi produk kelapa.

Meskipun program-program tersebut telah dilaksanakan, implementasinya menghadapi kendala konsistensi. Penelitian di Kecamatan Tembilahan menunjukkan bahwa

hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang berinisiatif tinggi mampu mengembangkan hasil pelatihan menjadi usaha nyata, seperti produksi minyak kelapa dan keripik kelapa yang dipasarkan melalui media sosial. Keberhasilan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor kapasitas individu, bukan oleh sistem pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Penelitian Rizqi et al. (2025) menunjukkan bahwa pengembangan UMKM berbasis kelapa (manisan kelapa gula aren) yang disertai pendekatan inovatif dan *learning by doing* mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini menggarisbawahi bahwa pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif dan berkelanjutan jauh lebih efektif dibandingkan program *top-down* yang bersifat satu arah.

Kendala Struktural dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kelapa

Penelitian mengidentifikasi empat kendala struktural yang saling

berkaitan dan membentuk lingkaran permasalahan yang menghambat pemberdayaan ekonomi:

Pertama, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kondisi kapasitas fiskal yang terbatas menyebabkan pemerintah daerah harus membagi prioritas anggaran ke berbagai sektor pembangunan sehingga alokasi bagi program pemberdayaan ekonomi dan pengembangan komoditas unggulan daerah belum optimal (Saparman et al., 2022).

Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi kendala dalam pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa. Tingkat pengetahuan dan kapasitas petani yang masih terbatas menyebabkan kemampuan dalam menerima inovasi, mengembangkan produk olahan, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi belum berjalan optimal sehingga proses pemberdayaan masih berada pada tahap penguatan kapasitas (*capacity building*) (Samsudin & Nurmasari, 2024).

Tabel 2. Kondisi Akses Pasar UMKM Berbasis Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir

Aspek Akses Pasar	Kondisi Empiris
Jangkauan pasar	Lokal–regional (dominan)
Akses pasar nasional	Terbatas
Akses ekspor	Sangat terbatas (sebagian kecil UMKM)
Saluran distribusi	Tengkulak, pengepul, pasar tradisional
Pemanfaatan <i>digital marketing</i>	Rendah–menengah
Kemitraan pasar	Masih terbatas
Hambatan utama	Logistik, sertifikasi, kualitas produk

Sumber: Data Hasil Wawancara dengan UMKM (2023–2024)

Ketiga, keterbatasan akses pasar. Sebagian besar petani masih bergantung pada tengkulak dalam menjual hasil panen dengan posisi tawar yang lemah. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa

pengembangan hilirisasi dan pengolahan produk turunan, petani kelapa cenderung tetap berada pada posisi *price taker* karena hanya menjual kelapa dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang

rendah, sedangkan pengolahan menjadi produk seperti kopra terbukti mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani secara lebih signifikan (Andika & Iskandar, 2023). Harga kelapa di wilayah sentra produksi seperti Indragiri Hilir cenderung rendah pada tingkat petani akibat terbatasnya akses transportasi, tingginya biaya distribusi, serta lemahnya sistem pemasaran dalam rantai pasok. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar keuntungan tidak dinikmati oleh petani, melainkan oleh pelaku pada rantai distribusi dan pemasaran (Nabillah et al., 2025; Wahyudi et al., 2025).

Keempat, keterbatasan infrastruktur. Kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang didominasi wilayah perairan dan rawa menyebabkan akses transportasi sangat terbatas di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Gaung, tingginya biaya logistik akibat sulitnya akses transportasi menekan harga jual di tingkat petani. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau menyatakan bahwa wilayah dengan akses transportasi terbatas cenderung mengalami harga jual komoditas yang lebih rendah akibat tingginya biaya distribusi dan keterbatasan akses pasar, yang pada akhirnya melemahkan posisi tawar petani dalam rantai pasok pertanian (Humang et al., 2023; Wahyudi et al., 2025).

Upaya Mengatasi Kendala dan Analisis Temuan

Pemerintah daerah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi kendala yang ada. Pertama, kolaborasi dengan pihak swasta, yang diwujudkan melalui kemitraan kelompok petani dengan pelaku usaha pengolahan kopra di Kecamatan Kateman. Kedua, mendorong

digitalisasi pemasaran, di mana beberapa UMKM di Kecamatan Tembilahan berhasil memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pasar di luar daerah. Ketiga, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan kelompok usaha bersama di Kecamatan Kempas.

Namun demikian, ketiga upaya tersebut masih menghadapi kendala dalam hal integrasi kebijakan, kapasitas SDM dalam mengadopsi inovasi, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Dunan et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM dapat meningkatkan akses pasar dan efisiensi pemasaran, namun keberhasilannya sangat bergantung pada peningkatan literasi digital masyarakat yang masih perlu diperkuat.

Secara analitis, hasil penelitian menunjukkan empat pola ketidakseimbangan. Pertama, sebagai regulator: kebijakan belum terintegrasi dari hulu ke hilir. Kedua, sebagai fasilitator: program ada tetapi tidak berkelanjutan. Ketiga, sebagai dinamisator: pendampingan lemah dan perubahan mindset belum terwujud. Keempat, sebagai katalisator: kolaborasi lintas sektor masih terbatas. Ketidakseimbangan ini menyebabkan program pemberdayaan berjalan secara parsial dan tidak menghasilkan dampak transformatif.

Dalam perspektif teori pemberdayaan Suharto (2017), proses pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa di Indragiri Hilir baru mencapai tahap kesadaran dan sebagian penguatan kapasitas, namun belum mencapai tahap kemandirian. Hal ini tercermin dari ketergantungan masyarakat yang masih tinggi pada bantuan pemerintah, rendahnya inovasi pengolahan produk, dan keterikatan pada pasar tradisional melalui tengkulak. Aris (2016) membuktikan

secara empiris bahwa sektor kelapa di Indragiri Hilir mengalami kebocoran wilayah yang signifikan, di mana nilai tambah lebih banyak mengalir ke luar daerah daripada dinikmati oleh masyarakat lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik lima simpulan utama. Pertama, peran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator dalam pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan secara optimal dan terintegrasi. Kebijakan masih berorientasi pada sektor hulu, sementara penguatan hilirisasi belum berkembang secara maksimal.

Kedua, program pemberdayaan yang dilaksanakan meliputi pelatihan pengolahan kelapa, bantuan modal dan alat, pengembangan UMKM, dan upaya hilirisasi sudah beragam namun belum efektif dalam jangka panjang akibat sifatnya yang sporadis dan tidak berkelanjutan.

Ketiga, kendala pemberdayaan bersifat struktural dan multidimensional, mencakup keterbatasan anggaran daerah, rendahnya kualitas SDM, terbatasnya akses pasar, dan infrastruktur yang belum memadai. Kendala-kendala ini saling berkaitan dan membentuk lingkaran kemiskinan yang sulit diputus tanpa intervensi sistemik.

Keempat, upaya pemerintah daerah berupa kolaborasi dengan swasta, digitalisasi pemasaran, dan penguatan kelembagaan telah dilakukan namun belum terintegrasi secara sistematis. Dampaknya masih sangat terbatas dan bergantung pada kapasitas SDM lokal.

Kelima, secara keseluruhan, pemberdayaan ekonomi berbasis

kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada tahap *capacity building* dan belum mencapai tahap kemandirian. Proses pemberdayaan yang berhasil mensyaratkan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, yang mencakup kebijakan terpadu, peningkatan SDM, akses pasar yang adil, penguatan kelembagaan, dan infrastruktur pendukung yang memadai.

Saran penelitian ini ditujukan kepada; (1) pemerintah daerah, untuk memprioritaskan integrasi kebijakan hilirisasi, meningkatkan alokasi anggaran pemberdayaan yang berkelanjutan, dan membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta dan lembaga keuangan; (2) masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM, untuk meningkatkan kapasitas diri dan memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran; (3) peneliti selanjutnya, untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan *mixed methods* guna mengukur dampak ekonomi pemberdayaan secara lebih terukur, atau memperluas cakupan wilayah sebagai studi perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Buyung Romadhoni, Khalid, I., Amir, & Manda H.M. (2024). Increasing the Income of Coconut Farmers Through Community Empowerment in Selayar Regency, Indonesia. *International Journal of Latest Technology in Engineering Management & Applied Science*, 13(8), 50–56. <https://doi.org/10.51583/IJLTEMAS.2024.130806>
- Alkadafi, M., Reagen, R., Ermansyah, E., & April, M. (2025). Potensi Hilirisasi Kelapa sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Daerah:

- Studi Kasus Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 11(3), 217–226.
<https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v11i3.491>
- Andika, I., & Iskandar, S. (2023). Analisis Nilai Tambah Pengolahan Kelapa Menjadi Kopra di Desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. *Societa*, 12(1), 35–41.
<https://doi.org/10.32502/jsct.v12i1.6309>
- Aris, A., Juanda, B., Fauzi, A., & Hakim, D. B. (2016). Dampak Pengembangan Perkebunan Kelapa Rakyat Terhadap Kemiskinan dan Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Agro Ekonomi*, 28(1), 69.
<https://doi.org/10.21082/jae.v28n1.2010.69-94>
- Awami, S. N., & Layaliya Faza, A. (2025). Added Value Analysis and Affecting Factors in Coconut Sugar Processing. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 30(2), 244–250.
<https://doi.org/10.18343/jipi.30.2.244>
- Basuki, N., Djumadil, N., Mahmud, H., & Sangadji, S. S. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Petani Kelapa dengan Diversifikasi Produk Olahan Kelapa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 7(2), 115–124.
<https://doi.org/10.31932/jpmk.v6i2.2882>
- BPS. (2022). *Produksi Kelapa Indonesia Tahun 2021*.
- BPS Kabupaten Indragiri Hilir. (2023). *Indragiri Hilir dalam Angka 2023*.
- Dunan, H., Hartabela, D., & Aprinisa, A. (2024). Pendampingan Program Pemberdayaan Kelompok UMKM Berbasis Olahan Kelapa di Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. *BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(2), 527–535.
<https://doi.org/10.30656/p7etqj12>
- Elfahmi, M., Sutiarto, L., Purwadi, D., & Machfoedz, M. M. (2024). Development of Integrated Coconut Agroindustry from a Circular Economy Perspective: A Literature Review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1364(1), 012001.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1364/1/012001>
- Humang, W. P., Aspar, W. A. N., Upahita, D. P., Muharam, A., Bowo, L. P., & Puriningsih, F. S. (2023). Competitiveness of Traditional Shipping in Sea Transportation Systems Based on Transport Costs: Evidence from Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(2), 627–634.
<https://doi.org/10.18280/ijstdp.180233>
- Iswantara, D. A. N., Nalinda, R., & Yekti, A. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Untuk Bermitra Dengan Perusahaan Lemon Di Banyumas Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 8(2), 756–770.
<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.008.02.29>
- Kementerian Pertanian RI. (2022). *Outlook Komoditas Kelapa 2022*.
<https://www.scribd.com/document/743804196/Outlook-Kelapa-2022>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Rosda.
- N. Kairupan, A., G. Kindangen, J., H. Joseph, G., T.P. Hutapea, R., Erik Malia, I., C. Paat, P., Polakitan, D., Polakitan, A., B. Markus Rawung, J., Lintang, M., O.M. Sondakh, J., Layuk, P., Grietjie Tandi, O., N. Salamba, H., H. Kario, N., Anugrah Lase, J., & Barlina, R. (2023). *Value Chain Implementation in Rural-Scale Integrated Coconut Farming System in North Sulawesi Province, Indonesia*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.110190>
- Nabillah, R., Fawzi, N. I., Awuh, H. E., Rijanta, Qurani, I. Z., Suwardi, & Danapriatna, N. (2025). Exploring the dynamics of supply chain sustainability and resilience in the coconut agriculture: the case of Indragiri Hilir in Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-025-06756-6>
- Ndraha, T. (2004). *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta.
- PPID Kabupaten Indragiri Hilir. (2024). *Roadmap Hilirisasi Kelapa 2025–2045*. <https://ppid.inhilkab.go.id/berita/detail/bappenas-luncurkan-roadmap-hilirisasi-kelapa>
- Rasyid, M. R. (2000). *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan*. Sinar Harapan.
- Rizqi, L. M. A., Rahmatullah, R. R., Bulqis, L., Agustini, L., Faksi, G., Karjaya, L. P., & Zulkarnain, Z. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pengembangan UMKM Manisan Kelapa Gula Aren di Desa Tetebatu Selatan, Sikur, Lombok Timur. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 4(02), 189–202. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v4i02.430>
- Rusdi, R., Harianto, H., Hartoyo, S., & Novianti, T. (2021a). Analysis the Effect of Coconut Production Risk and Price on the Economic Behavior of Coconut Farmers in Seruyan District, Central Borneo Province, Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(3), 64–71. <https://www.econjournals.com/tr/index.php/ijefi/article/view/11340>
- Rusdi, R., Harianto, H., Hartoyo, S., & Novianti, T. (2021b). The Impact of Production and Price Risks on The Economic Behavior of Coconut Farmers' Households in Seruyan Regency, Central Borneo Province. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*. <https://doi.org/10.17358/jma.18.3.372>
- Samsudin, S., & Nurmasari, N. (2024). Pemberdayaan Petani Kelapa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. *Journal of Public Administration Review*, 1(2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/18850>
- Saparnan, S., Tampubolon, D., & Syapsan Syapsan. (2022). Pengaruh Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan

- Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2011–2020. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 70–78.
<https://doi.org/10.34308/eqien.v9i1.310>
- Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.
- Suprianto, S., & Chandra, P. S. (2023). Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. *Journal of Administration Studies*, 1(1), 1–8.
<https://asas-ins.com/index.php/jas/article/view/30>
- Syah, S. U. (2023). Potential and Feasibility of Development of Coconut Product Hiliration in Indragiri Hilir Regency. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS)*, 2(1), 29–40.
<https://doi.org/10.59188/icss.v2i1.81>
- Syarifuddin, S. (2022). Coconut-Based Community Economic Development Strategy In Indragiri Hilir Regency. *ADPEBI International Journal of Business and Social Science*, 2(1), 13–21.
<https://doi.org/10.54099/aijbs.v2i1.106>
- Vaulina, S., Titisari, P. W., Elinur, Zahrah, S., & Dewi, I. S. (2024). Exploring the relationship between land characteristics and the sustainable growth of coconut cultivation in Indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 14(4), 147–166.
<https://doi.org/10.55493/5005.v14i4.5222>
- Wahyudi, A., Ardana, I. K., Aunillah, A., Rianto, B., Anggoro, U. K., Hasibuan, A. M., Mardiharini, M., Indrawanto, C., Wardono, B., Sujianto, Ermiami, Sudjarmoko, B., Listyati, D., & Ferry, Y. (2025). Building sustainable and resilient coconut supply chains in remote areas: a study from Riau Province – Indonesia. *Sustainable Futures*, 9, 100709.
<https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100709>